

**STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGKAP PADA
MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

DEVI ERAWATI

ABSTRACT

Basically, the form of adat marriage in Gayonese is similar to that of the Indonesian people. In the Gayonese adat law, there is a specific marriage which is called 'angkap' marriage. This marriage usually consists of two types. First, a family that has the only daughter does not want her to move to her husband's side. Secondly, a young man who has no family comes to a certain village; by conducting angkap marriage, he does not need to pay for dowry. This young man comes from the coastal area or from different ethnic group to Gayo; he has good manners and is willing to work. The angkap marriage has been ruled in the Gayonese adat law.

Keywords: Implementation of Angkap Marriage, Controversy in Angkap Marriage

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan),¹ bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1 TLN 3019)

perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam adat perkawinan Suku Gayo ada model perkawinan "*Angkap*". Perkawinan *Angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak lelaki, dan berminat mendapat seorang menantu lelaki, maka keluarga tersebut meminang sang pemuda (umumnya lelaki berbudi baik dan alim) inilah yang dinamakan "*Angkap Berperah, Juelen Berango*" (*Angkap* dicari/diseleksi, *Juelen* diminta). Menantu lelaki ini disyaratkan supaya selamanya tinggal dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga. Sang menantu mendapat harta waris dari keluarga Istri. Dalam konteks ini dikatakan "*Anak angkap penyapuni kubur kubah, si muruang iosah umah, siberukah iosah ume*" (menantu lelaki penyapu kubah kuburan, yang ada tempat tinggal beri rumah, yang ada lahan beri sawah).²

Perkawinan *angkap* ini dapat dibedakan menjadi dua macam *angkap*, yaitu *angkap nasap* dan *angkap sementara*. Pada perkawinan *angkap nasap* menyebabkan suami kehilangan belahnya, karena telah ditarik ke dalam *belah* istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai perselisihan) dalam kawin *angkap nasap* ini, menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali *kebelah* asalnya, dan tidak diperbolehkan membawa harta *tempah*, kecuali harta *sekarat*.

Namun jika terjadi *cere kasih*, misalnya istri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam *belah* istrinya. Pada suatu ketika, saat mantan suami tersebut akan dikawinkan kembali oleh *belah* istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu adalah suaminya, maka istrinya pada *belah* asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta *tempah* peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya.

Kawin *angkap sementara* pada masyarakat Gayo juga disebut dengan *angkap edet*. Seorang suami dalam waktu tertentu menetap dalam *belah* istrinya sesuai dengan perjanjian saat dilakukan peminangan. Status sementara itu tetap

² Batavusqu "*Pernikahan adat masyarakat gayo aceh*", [http://Zipuer 7, Wordpress.com/2009/10/04/pernikahan -adat-masyarakat-gayo-aceh](http://Zipuer7.Wordpress.com/2009/10/04/pernikahan-adat-masyarakat-gayo-aceh), diakses pada tanggal 10 juni 2014

berlangsung terus selama suami belum mampu memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan waktu peminangannya.

Jika terjadi perceraian dalam bentuk *cere banci*, suami akan kembali kedalam pihak belahnya, dan harta sekarat akan dibagi-bagi, jika syarat-syarat *angkap sementara* telah dipenuhi oleh suami, sedangkan harta tempah, misalnya istri meninggal, maka suami tidak akan berubah statusnya sampai masa perjanjian *angkap* selesai. Oleh karena itu, menjadi kewajiban belah istrinya untuk mengawinkan kembali dengan salah seorang kerabatnya.³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai Perkawinan *Angkap* di Kabupaten Aceh Tengah, yang dituangkan dalam judul tesis “Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana Pertentangan Perkawinan *Angkap* dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Perkawinan *Angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertentangan Perkawinan *Angkap* dengan Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Wawancara dengan Yahya Arias, Ketua Adat kampung pasar pagi lama, hari selasa 7 oktober 2014 pukul 14:00 WIB

3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perkawinan *angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?

II. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari kata “Metode dan Logos”. Metode yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*⁵ berarti menggambarkan serta menjelaskan Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*⁶ untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat mengakibatkan perubahan social dilakukan maka diperlukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari yaitu dengan menselaraskan dengan peraturan yang ada baik hukum Islam maupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grpindo Persada 2001), hlm 3

⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta Ghalia Indonesia 1990), hlm 14

⁶ Cholid Narbuho Dan Haji Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2002) hlm 1

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan dalam adat Gayo mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan karena masyarakat Gayo menganut sistem Perkawinan *exogami* (perkawinan antar *belah*). Menurut adat masyarakat Gayo perkawinan dengan sistem *endogami* (kawin satu *belah*) menjadi larangan atau pantangan karena sesama klen masih dianggap masih memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah. Dengan demikian akan memudahkan hubungan genealogis antara satu kampung dengan kampung lainnya. Ada tiga macam jenis perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Gayo yaitu Kawin *ango* atau *juelen*, kawin *angkap* dan kawin *kuso kini*.

1. Kawin *Ango* atau *Juelen*

Kawin *ango* atau *juelen* adalah bentuk perkawinan yang mengharuskan pihak calon suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri. Setelah dibeli, maka istri menjadi *belah* suami. Jika pada suatu ketika terjadi *cere banci* (cerai perselisihan), si istri menjadi *ulak kemulak* (kembali ke *belah* asalnya). Mantan istri dapat membawa kembali harta *tempah* (harta pemberian orang tuanya) dan demikian pula harta *sekarat* (harta dari hasil usaha bersama). Namun jika terjadi *cere kasih* (cerai mati), tidak menyebabkan perubahan status (*belah*) bagi keduanya. Sebagai contoh misalnya, jika suami meninggal, maka *belah* suami berkewajiban untuk mencarikan jodoh mantan istrinya tadi dengan salah seorang kerabat yang terdekat dengan almarhum suaminya. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka pihak yang ditinggalkan berhak mengembalikan harta *tempah* kepada *belah* asal harta itu. Jika yang meninggal itu ada keturunan, maka harta *tempah* itu menjadi milik anak keturunannya.

2. Kawin *Angkap*

Kawin *angkap* adalah bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pihak laki-laki (suami) ditarik ke dalam *belah* istri.

Perkawinan *angkap* ini dapat dibedakan menjadi dua macam *angkap*, yaitu *angkap nasap* dan *angkap sementara*. Pada perkawinan *angkap nasap* menyebabkan suami kehilangan belahnya, karena telah ditarik ke dalam belah istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai perselisihan) dalam kawin *angkap nasap* ini, menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali ke belah asalnya, dan tidak diperbolehkan membawa harta tempah, kecuali harta sekarat.

Namun jika terjadi *cere kasih*, misalnya istri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam *belah* istrinya. Pada suatu ketika, saat mantan suami tersebut akan dikawinkan kembali oleh belah istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu adalah suaminya, maka istrinya pada *belah* asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta *tempah* peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya.

Kawin *angkap sementara* pada masyarakat Gayo juga disebut dengan *angkap edet*. Seorang suami dalam waktu tertentu menetap dalam belah istrinya sesuai dengan perjanjian saat dilakukan peminangan. Status sementara itu tetap berlangsung terus selama suami belum mampu memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan waktu peminangannya. Jika terjadi perceraian dalam bentuk *cere banci*, suami akan kembali kedalam pihak *belahnya*, dan harta *sekarat* akan dibagi-bagi, jika syarat-syarat *angkap sementara* telah dipenuhi oleh suami, sedangkan harta *tempah*, misalnya istri meninggal, maka suami tidak akan berubah statusnya sampai masa perjanjian *angkap* selesai. Oleh karena itu, menjadi kewajiban *belah* istrinya untuk mengawinkan kembali dengan salah seorang kerabatnya.

3. Kawin Kuso Kini

Kawin *kuso kini* adalah suatu bentuk perkawinan yang memberi kebebasan kepada suami istri untuk memilih tempat tinggal dalam belah suami atau belah istri. Pada kawin *kuso kini*, suami istri dapat menetap pada keluarga atau mandiri pada rumah dan pekerjaan mereka sendiri tetapi tetap memandang dan

membantu keluarga kedua belah pihak dengan baik. Bentuk perkawinan *kuso kini* ini berbeda dengan perkawinan *anggo* dan *angkap* yang selalu mempertahankan *belah*. Bentuk perkawinan ini masih banyak pula terjadi dalam masyarakat Gayo hingga sekarang.

Perkawinan *Angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai keturunan anak lelaki yang berminat mendapat seorang menantu lelaki, maka keluarga tersebut meminang sang pemuda (umumnya lelaki berbudi baik dan alim) inilah yang dinamakan “*Angkap Berperah, Juelen Berango*” (*Angkap* dicari/diseleksi, *Juelen* diminta). Menantu lelaki ini disyaratkan supaya selamanya tinggal dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga. Sang menantu mendapat harta waris dari keluarga Istri. Dalam konteks ini dikatakan “*Anak angkap penyapuni kubur kubah, si muruang iosah umah, siberukah iosah ume*” (menantu lelaki penyapu kubur kuburan, yang ada tempat tinggal beri rumah, yang ada lahan beri sawah).⁷

Perkawinan *angkap* ini dapat dibedakan menjadi dua macam *angkap*, yaitu *angkap nasap* dan *angkap sementara*. Pada perkawinan *angkap nasap* menyebabkan suami kehilangan belahnya, karena telah ditarik ke dalam belah istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai perselisihan) dalam kawin *angkap nasap* ini, menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali *kebelah* asalnya, dan tidak diperbolehkan membawa harta *tempah*, kecuali harta *sekarat*.

Namun jika terjadi *cere kasih*, misalnya istri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam belah istrinya. Pada suatu ketika, saat mantan suami tersebut akan dikawinkan kembali oleh belah istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu adalah suaminya, maka istrinya pada *belah* asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta tempah peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya.

⁷ Batavusqu “*Pernikahan adat masyarakat gayo aceh*”, [http://Zipuer 7, Wordpress.com/2009/10/04/pernikahan –adat-masyarakat-gayo-aceh](http://Zipuer7.Wordpress.com/2009/10/04/pernikahan-adat-masyarakat-gayo-aceh), diakses pada tanggal 10 juni 2014

Kawin *angkap sementara* pada masyarakat Gayo juga disebut dengan *angkap edet*. Seorang suami dalam waktu tertentu menetap dalam *belah* istrinya sesuai dengan perjanjian saat dilakukan peminangan. Status sementara itu tetap berlangsung terus selama suami belum mampu memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan waktu peminangannya.

Jika terjadi perceraian dalam bentuk *cere banci*, suami akan kembali kedalam pihak belahnya, dan harta sekarat akan dibagi-bagi, jika syarat-syarat *angkap sementara* telah dipenuhi oleh suami, sedangkan harta *tempah*, misalnya istri meninggal, maka suami tidak akan berubah statusnya sampai masa perjanjian *angkap* selesai. Oleh karena itu, menjadi kewajiban *belah* istrinya untuk mengawinkan kembali dengan salah seorang kerabatnya.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, statifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya.⁸

Adanya perubahan-perubahan tersebut akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah yaitu :

- a. Pada taraf pribadi atau individu maka timbul masalah bagaimana mengamankan identitasnya sebagai manusia, sebagai warga masyarakat dan sebagai penganut tradisi kebudayaan tertentu.
- b. Pada taraf struktural, timbul masalah bagaimana mengorganisasikan pola peranan dan kelompok-kelompok yang baru.
- c. Pada taraf kebudayaan timbul masalah bagaimana membentuk tradisi baru yang akan dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat dalam masa transisi.

Perkawinan bukan hanya terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan akan tetapi perkawinan tersebut juga merupakan perpaduan antara suatu keluarga dan suatu *belah* dengan keluarga dan belah yang lain, perkawinan terjadi karena adanya konsensus antara dua belah pihak dan para pihak mengetahui konsekwensi dari konsensus tersebut, dengan demikian

⁸ Soerjono Soekanta, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 1

maka ungkapan *murip betenes*, *mate berbedes* dan *Ken penurip ni Murip*; *ken penanom mate*; *pemake ni jarum patah*; *penyapu ni kubah kubur*: pada masa lalu merupakan suatukonsekwensi yang dapat diterima oleh para pihak dan dinikmati oleh pihak tersebut sebagai suatu kewajiban. Mungkin suatu yang tidak tepat bila kebersahajaan tersebut kita amati dan analisis dengan kehidupan kita pada saat ini, berubahnya pola hidup suku Gayo saat ini khususnya sejak tahun sembilan belas enam puluhan maka telah terjadi pergeseran nilai dalam perkawinan ini yang di kenal dengan kerje *kuso kini* (bilateral), pergeseran nilai ini tidak terlepas dari pola hidup masyarakat Gayo yang semakin berkembang dan juga andil dari penerapan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengarahkan kehidupan rumah tangga menjadi lebih kearah bilateral.

Oleh karena adat istiadat tersebut tidak bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis dan terus berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kajian ini berguna bagi kita bahwa didalam kehidupan masyarakat Gayo tempo dulu penghormatan terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki telah disejajarkan dan tidak ada berat sebelah itulah mungkin kesetaraan gender ala suku Gayo pada kehidupan masa lalu, dan terasa aneh bila hal tersebut kita analisis dari kehidupan sekarang.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut antara lain:

a. Faktor Agama

Agama Islam telah lama masuk kedalam lingkungan adat Gayo. Dalam perkembangannya secara bertahap ajaran islam telah banyak merubah dan menyempurnakan tata susunan adat lama. Selain itu agama Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Ajaran itu berbeda dengan ajaran adat sebelumnya, dimana dalam perkawinan *angkap* ini seorang anak hanya berhubungan dengan ibunya saja, sedangkan menurut Islam hubungan itu juga termasuk dengan keluarga ayahnya.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Kecamatan Pegasing, tanggal 18 Oktober 2014

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dianggap sebagai faktor yang melandasi seseorang mau *dianggap*, karena dengan ia *dianggap* maka ia mendapatkan hibah dari orang tua si istri. Dengan berkembangnya perekonomian maka laki-laki yang menjadi suami yang sudah merasa mampu untuk menghidupi keluarga sendiri tanpa tergantung lagi kepada orang tua istri.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi perkembangan bentuk perkawinan terutama bagi yang melakukan pendidikan di rantau dan semakin tingginya pendidikan mereka melakukan proses belajar maka cara berfikir mereka biasanya menjadi semakin lebih maju dan terbuka.

Jadi Perkawinan *Angkap* masa kini telah banyak perubahan, namun masih kita jumpai juga perkawinan *angkap* yang tidak sesuai sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad¹⁰ yang berarti” mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.¹¹

Menurut pengertian sebagian fuqaha pernikahan ialah:

“Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafal *nikah* atau *zawaj* atau yang semakna keduanya.”

Tujuan dari adanya perkawinan yang di *syari’at*kan agama Islam sebagai suatu bentuk dari ibadah adalah :

¹⁰ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Pranaditya Media, 2007), hlm 36

¹¹ Kamal Muchtar, “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*” ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 11

1. Untuk melanjutkan keturunan adalah hal penting dalam rangka pembentukan umat Islam yang mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang didalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup luas menimbulkan perdamaian dalam masyarakat di dasarkan rasa cinta kasih terhadap sesama.¹²
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
3. Untuk memenuhi atau mencukupi kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum antara pria dan wanita itu saling membutuhkan. .
4. Untuk menghormati Sunnah Rasul
5. Untuk mendekatkandan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.
6. Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³

Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :

¹² Asmin, “*Status Perkawinan Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*”, (Jakarta: PT. Dian Rakyat ,1986), hlm 29

¹³ Haji Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Isalm di Indonesia*”, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm 75-78

1. Syarat Material, yang terdiri dari :

- a. Syarat Material Absolut.
- b. Syarat Material Relatif.

2. Syarat Formal.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang wajib diperhatikan di dalam melaksanakan perkawinan disebut syarat material absolut yang terdiri dari :¹⁴

- a. Asas Monogami.
- b. Persetujuan antara kedua calon suami istri.
- c. Memenuhi syarat umur minimal.
- d. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.¹⁵

Dalam perkawinan *angkap* pada pokoknyaharta digolongkan menjadi 2 (dua) macam,yaitu :

1. Harta *tempah* (Harta pemberian orang tua)
2. Harta *sekarat* (Harta dari hasil usaha bersama)

Untuk dapatnya harta *tempah* dijadikan harta warisan, harus diadakan pemurnian dengan jalan mengeluarkan hak suami dan hak istri, namun hal ini dilakukan hanya bila suami tersebut telah keluar dari perkawinan *angkap* tersebut.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa harta *sekarat* (harta pencarian) sama sekali tidak tercampur dengan harta *tempah* (harta pemberian orang tua), bagi masyarakat Gayo yang melakukan perkawinan *angkap*. harta *sekarat* itu dibagi menurut hukum Islam.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah telah mengalami perubahan. Hal ini akibat dapat kita lihat pada pewarisan, pemberian mahar dan dari hubungan kekerabatan antara suami dan dengan orang tuanya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

¹⁴ Sudarsono, “*Hukum Kekeluargaan Nasional*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 6

¹⁵ *Ibid*, hlm 6-7

adalah faktor Agama, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Oleh karena adat istiadat tersebut tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis dan terus berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kajian ini berguna bagi kita bahwa didalam kehidupan masyarakat Gayo, tempo dulu penghormatan terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki telah disejajarkan dan tidak ada berat sebelah. Kesetaraan gender ala suku Gayo pada kehidupan masa lalu, dan terasa aneh bila hal tersebut kita analisis dari kehidupan sekarang.

2. Perkawinan *angkap* di Kabupaten Aceh Tengah bertentangan dengan peraturanyang ada baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam masalah pemberian mahar dan pewarisan. Hukum pemberian mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu dan berdosa suami tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar tersebut ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 4, yaitu : "Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Pewarisan menurut Hukum Islam dan Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 Didalam KUHPerdara mengenai syarat atau batasan untuk dapat menjadi seorang ahli waris, terdapat pada Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan: "Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sedangkan pewarisan menurut hukum Islam adalah: Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yaitu:

- a. Kerabat hakiki (yang ada hubungan ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bias menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
 - c. *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi sebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewaris terhadap budak yang dibebaskan, bila budak tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan
3. Perkawinan *Angkap* dalam masyarakat Gayo mempunyai akibat hukum dalam:

Dengan ditariknya laki-laki atau suami kedalam *blah* atau klan keluarga istri maka sisuami berkewajiban membantu orang tua istrinya ketika ia masih hidup dan mengurus jenazahnya ketika mereka meninggal. Oleh karena itu ia berhak memakai harta peninggalan mertuanya sebagai warisan maupun sebagai hibah.

Anak dalam masyarakat Gayo yang melakukan Perkawinan *Angkap* adalah generasi penerus dari klan ibunya, dimana dalam Perkawinan *angkap* ini menarik garis keturunan melalui garis ibunya. Artinya anak-anak adalah keturunan ibunya, tetapi tidak dimunculkan pada penyebutan di belakang nama si anak.

Harta *tempah* (harta bawaan) yang diberikan orang tua dari istri bukan merupakan harta *sekarat* (harta bersama) sehingga apabila terjadi perceraian maka sisuami tidak dapat membawa kembali harta *tempah*

(harta bawaan) tersebut, tetapi si suami masih mendapatkan bagian dari harta *sekarat* (harta bersama) tersebut.

B. Saran

1. Disarankan kepada Ketua Adat dan Aparat Desa untuk melakukan pengarahan atau bimbingan kepada masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan *angkap* yang bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
2. Disarankan kepada masyarakat Gayo dalam melaksanakan perkawinan *angkap* harus memperhatikan Hukum adat setempat dan hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga semuanya bisa berjalan beriringan dan harmonis.
3. Disarankan kepada pasangan suami istri masyarakat Gayo agar membuat catatan (daftar) harta *tempah* (harta bawaan) masing-masing suami dan istri untuk menghindarkan terjadinya perselisihan mengenai kepemilikan harta bawaan apabila terjadi perceraian, dan sebaiknya dibuat juga Akta Perjanjian Kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, Pranadtya Media, Jakarta, 2007
- Asmin, *“Status Perkawinan Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974”*, PT. Dian Rakyat , Jakarta, 1986
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum Suatu Pengantar*, Raja Grpindo Persada. Jakarta, 2001
- Batavusqu *“Pernikahan adat masyarakat gayo aceh”*,[http://Zipuer 7, Wordpress.com/2009/10/04/pernikahan–adat-masyarakat-gayo-aceh](http://Zipuer7.wordpress.com/2009/10/04/pernikahan-adat-masyarakat-gayo-aceh), diakses pada tanggal 10 juni 2014
- Batavusqu *“Pernikahan adat masyarakat gayo aceh”*,[http://Zipuer 7, Wordpress.com/2009/10/04/pernikahan –adat-masyarakat-gayo-aceh](http://Zipuer7.wordpress.com/2009/10/04/pernikahan–adat-masyarakat-gayo-aceh),diakses pada tanggal 10 juni 2014
- Cholid Narbuho Dan Haji Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Haji Abdurrahman, *“Kompilasi Hukum Isalm di Indonesia”*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995
- Hasil Wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Kecamatan Pegasing, tanggal 18 Oktober 2014
- Kamal Muchtar, *“Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”* , Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanta, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sudarsono, *“Hukum Kekeluargaan Nasional”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1 TLN 3019)
- Wawancara dengan Yahya Arias, Ketua Adat kampung pasar pagi lama, hari selasa 7 oktober 2014 pukul 14:00 WIB